



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
JALAN TAMAN SUROPATI 2, JAKARTA 10310
TELEPON : 31936207 - 3905650

Nomor : 3036/Ses/06/2007

4 Juni 2007

Lamp. : 1 (satu) berkas

Perihal : Informasi Beasiswa Gelar
Pusbindiklatren Bappenas
Tahun 2008

Kepada Yth;

1. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama
Departemen/LPND;
2. Deputi Sumber Daya Manusia POLRI;
3. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
(daftar terlampir)

Dalam rangka meningkatkan kapasitas institusi perencanaan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota melalui peningkatan potensi SDM di dalamnya serta sejalan dengan fungsi Bappenas sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perencana, maka Bappenas pada Anggaran Tahun Dinas 2008 Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Bappenas kembali memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya bagi staf perencana yang bekerja di Bappenas, Unit Perencanaan di Departemen/LPND, Bappeda atau nama lain, dan unit perencanaan di Dinas Teknis pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk memperoleh Beasiswa Gelar Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2008 untuk program : (a) S2 Dalam Negeri 13 Bulan; (b) S2 *Double Degree*, (c) S2 Luar Negeri, S3 Dalam Negeri dan (d) S3 *Linkage*.

Untuk seleksi beasiswa tahun 2008 dan seterusnya, Pusbindiklatren Bappenas membuka kesempatan menyampaikan usulan calon peserta melalui pendaftaran sepanjang tahun. Dengan demikian, dimulai dengan seleksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2007 ini, selanjutnya Pusbindiklatren Bappenas akan memiliki jadwal tetap, yaitu untuk pelaksanaan TPA setiap bulan Oktober-November dan pelaksanaan TOEFL setiap bulan November-Desember.

NO	KEGIATAN	JADWAL UNTUK PROGRAM S2 DD, S2 DN, S2 LN, S3 DN, S3 LINKAGE
1	Surat Edaran Sesmen	8 Juni 2007
2	Batas pengajuan usulan untuk TPA tahun 2007	28 September 2007
3	TPA Nasional	3 November 2007
4	TOEFL Nasional	1 Desember 2007
5	BEAP	Juli - Sept 2008 dan/atau Okt - Des 2008
6	EAP	M II Feb s.d. M II Agustus 2008

Dengan dikeluarkannya informasi jadwal pelaksanaan seleksi yang baru ini berarti jadwal pelaksanaan seleksi yang pernah diinformasikan sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi.

Sedangkan proses pengusulan peserta sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu secara resmi diusulkan oleh instansi asalnya melalui pejabat pengelola kepegawaian atau atasan langsung (minimal eselon II) dalam surat yang menyebutkan nama-nama pegawai yang diusulkan oleh instansi dan program beasiswa gelar yang diminati. Kriteria pelamar beasiswa program gelar Pusbindiklatren bappenas adalah PNS yang memenuhi syarat sesuai yang tercantum pada Buku Panduan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan dan Pelaksanaan JFP 2007 dan belum pernah mengambil/memiliki gelar S2 untuk yang melamar beasiswa S2 serta belum pernah mengambil/memiliki gelar S3 untuk yang melamar beasiswa S3.

Mengingat terbatasnya dana, beasiswa Pusbindiklatren Bappenas ini dilaksanakan selain melalui mekanisme *cost sharing* tipe I (lampiran 3), mulai tahun 2006 yang lalu khusus untuk S2 13 Bulan Dalam Negeri juga dibuka kemungkinan melalui mekanisme *cost sharing* tipe IV dengan penjelasan rinci sebagaimana terlampir (lampiran 4). *Cost Sharing* tipe IV diberikan apabila peserta yang memenuhi syarat melampaui quota peserta per universitas (15-20 peserta per universitas).

Informasi mengenai persyaratan peserta, selain dapat dilihat dalam Buku Panduan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan dan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana, yang secara singkat disajikan dalam lembar Informasi Program Beasiswa Pusbindiklatren Tahun 2008 (lampiran 1). Untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut silakan menghubungi (021) 31931465, 31931447, 31931234, 3103705, e-mail: pusbindiklatren@bappenas.go.id, atau melihat informasi pada situs Pusbindiklatren, Bappenas melalui situs: <http://www.pusbindiklatren.bappenas.go.id>.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Menteri PPN/Sekretaris Utama
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,

Ir. Syahril Loetan, MCP

Tembusan Yth.:

1. Bapak Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
2. Gubernur/Walikota/Bupati;
3. Biro/Bagian Kepegawaian Departemen/LPND/POLRI;
4. Kepala Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota;
5. Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota;
6. PPK PSDMA Bappenas.

Kepada Yth.:

A. BIRO KEPEGAWAIAN DAN PUSDIKLAT DEPARTEMEN/LPND :

1. Sekretarat Negara;
2. Departemen Agama;
3. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata;
5. Departemen Kelautan dan Perikanan;
6. Departemen Perhubungan;
7. Departemen Perindustrian;
8. Departemen Perdagangan;
9. Departemen Pekerjaan Umum;
10. Departemen Pertanian;
11. Departemen Koperasi dan UKM;
12. Departemen Kehutanan;
13. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);
14. Kementerian Koordinator Perekonomian;
15. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL);
16. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN);
17. Badan Pertanahan Nasional (BPN);
18. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN);
19. Badan Kepegawaian Negara (BKN);
20. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
21. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
22. Lembaga Administrasi Negara (LAN);
23. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI);
24. Perpustakaan Nasional.

B. SETDA/BADAN/BIRO/BAGIAN KEPEGAWAIAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA :

1. Nanggroe Aceh Darussalam;
 2. Sumatera Utara;
 3. Sumatera Selatan;
 4. Sumatera Barat;
 5. Sulawesi Utara;
 6. Sulawesi Tenggara;
 7. Sulawesi Tengah;
 8. Sulawesi Selatan;
 9. Sulawesi Barat;
 10. Gorontalo;
 11. Bangka Belitung;
 12. Bengkulu;
 13. Jambi;
 14. Bali;
 15. DKI;
 16. Banten;
 17. D I Y;
 18. Irjabar;
 19. Lampung;
 20. Jawa Barat;
 21. Jawa Tengah;
 22. Jawa Timur;
 23. Kalimantan Barat;
 24. Kalimantan Selatan;
 25. Kalimantan Tengah;
 26. Kalimantan Timur;
 27. Maluku;
 28. Maluku Utara;
 29. NTB;
 30. NTT;
 31. Riau;
 32. Kepulauan Riau;
 33. Papua;
-